

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pasal 189 - 193. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang mana untuk melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima dari pemerintah yang berasal dari APBD.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia, pemerintah kelurahan merupakan bagian dari organisasi pemerintahan yang menjalankan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan yang lebih tinggi, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang berada di bawahnya. Kelurahan merupakan basis unit pemerintahan terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan tergantung pada sejauh mana partisipasi masyarakat setempat dan aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan.

Kelurahan sendiri yang anggarannya berasal dari APBD yaitu menggunakan DAU tambahan. Hal tersebut digunakan dalam pengadaan, pembangunan, pemukiman, transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan UMKM, dan lain sebagainya. Menurut Pasal 230 Ayat 4 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran untuk pembangunan dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi DAK.

Pandemi *Covid-19* yang semakin hari semakin meningkat di Indonesia khususnya pada tahun 2020, tentunya berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, pandemi *Covid-19* hampir melumpuhkan kondisi sosial perekonomian masyarakat Indonesia. Akibat Pandemi ini, pemerintah Indonesia mulai melakukan berbagai kebijakan, seperti mengeluarkan imbauan *Social Distancing*, mengeluarkan imbauan *Work From Home* bagi karyawan, memberlakukan pembatasan wilayah, dan menerapkan *New Habit Adaption*. Akan hal itu pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19* memfokuskan untuk pengalokasian dana bantuan kepada Masyarakat. Sehingga pemerintah perlu menyusun kembali skala prioritas yang tercantum di dalam anggaran. kebijakan tersebut penting sekali dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya resesi ekonomi lebih dalam akibat dampak pandemi *Covid-19*. Berdasarkan keputusan Walikota Magelang Nomor 367/80/112 Tahun 2020, perubahan pada anggaran tentu mengakibatkan fleksibilitas terhadap pelaporan keuangan. Keputusan Walikota Magelang tersebut didasari oleh

keputusan Menteri Keuangan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Covid-19*.

Terbitnya keputusan Walikota Magelang tentang penanganan *Covid-19* tentunya setiap satker harus memahami, mematuhi, dan menjalankan dengan baik begitu pula dengan Kelurahan Gelangan. Keputusan Walikota tersebut akan menjadi pokok-pokok kebijakan baru dalam alokasi dana penanganan *Covid-19*. Perlu diketahui bahwa alokasi dana untuk penanganan *Covid-19* sangatlah besar. Realokasi dana merupakan hal yang penting untuk dilakukan untuk penanganan *Covid-19*, meskipun dana tersebut diambil dari post-post belanja lainnya. Tidak luput pula untuk tahun anggaran 2021, pemerintah juga mempersiapkan kebijakan fiskal 2021 yang masih diliputi ketidakpastian. Sehingga untuk tahun anggaran 2020 akan menjadi patokan untuk tahun anggaran 2021 guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak *Covid-19*.

Kelurahan Gelangan salah satu perangkat daerah yang mewadahi secara langsung alokasi dana *Covid-19* kepada masyarakat dan dapat lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga anggaran yang didapat oleh kelurahan dapat dialokasikan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan meninjau fleksibilitas pelaporan keuangan atas dana yang diperoleh Kelurahan Gelangan dalam upaya penanganan *Covid-19*. Tinjauan tersebut akan penulis tuangkan pada Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Pelaporan Keuangan Kelurahan Gelangan di Masa Pandemi”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelaporan keuangan Kelurahan Gelangan selama masa pandemi?
2. Bagaimana alokasi anggaran pada Kelurahan Gelangan selama masa pandemi?
3. Apakah terdapat kendala dan solusi yang tepat dalam penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Gelangan selama masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk meninjau alokasi anggaran pada Kelurahan Gelangan selama masa pandemi?
2. Untuk meninjau pelaksanaan pelaporan keuangan Kelurahan Gelangan selama masa pandemi.
3. Untuk mengidentifikasi kendala dan solusi yang tepat dalam penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Gelangan selama masa pandemi?

1.4 Ruang Lingkup

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini memiliki ruang lingkup terbatas yaitu melakukan tinjauan atas pelaporan keuangan Kelurahan Gelangan tentang dana *Covid-19* di masa pandemi. Untuk itu penulis menggunakan data tahun 2019, 2020, dan 2021. Riset dilakukan di Jl. Abimanyu No.77, Kelurahan Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56112.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini semoga dapat memberikan manfaat pada:

1. Kantor Kelurahan Gelangan, penulis berharap agar Karya Tulis Tugas ini dapat membantu baik secara langsung maupun tidak langsung pada proses evaluasi fleksibilitas pelaporan keuangan Kelurahan Gelangan di masa pandemi.
2. Akademisi, diharapkan dapat menjadi referensi dalam Karya Tulis, Penerbitan jurnal, dan penulisan lainnya pada masa pandemi seperti ini.

Penulis berharap agar masyarakat dalam membaca karya tulis ini mengetahui terkait alokasi anggaran yang diberikan kepada masyarakat oleh Kelurahan Gelangan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I, Penulis akan memberikan gambaran terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Terkait hal itu menjadi pegangan penulis terkait riset yang akan ditulis pada Karya Tulis Tugas Akhir tentang tinjauan fleksibilitas pelaporan keuangan Kelurahan Gelangan di masa pandemi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab II, penulis akan menyajikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir disertai data dan fakta yang relevan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III, penulis akan menyajikan data yang akan dibahas pada Karya Tulis Tugas Akhir terkait metode pengumpulan data yang akan diambil. Kedua, penulis menjelaskan tinjauan terkait alokasi anggaran pada Kelurahan Gelangan

selama masa pandemi. Ketiga, penulis menjelaskan tinjauan terkait fleksibilitas pelporan keuangan Kelurahan Gelangan selama masa pandemi. Keempat, penulis menganalisis terkait kendala dan solusi yang yang tepat dalam penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Gelangan selama masa pandemi.

BAB IV SIMPULAN

Pada Bab IV, yang merupakan bagian penutup dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang penulis akan jabarkan secara ringkas kesimpulan atas tinjauan yang dilakukan pada Kelurahan Gelangan.